

# **Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
Jln. Kidang Pananjung No.03 Pangandaran 46396  
Email : [bapendakabupatenpangandaran@gmail.com](mailto:bapendakabupatenpangandaran@gmail.com)



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Kidang Pananjung Pangandaran 46396  
email : bapendakabpangandaran@gmail.com

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR :050/ 46.A -BAPENDA/2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2023**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Badan pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022;
- b. Bahwa Rencana Kerja Badan pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 disusun berpedoman pada 43 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Renstra BPKD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);

41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);
43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 48);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 55 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 55).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2023

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Keputusan Kepala BAPENDA Kabupaten Pangandaran ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut Renstra BAPENDA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
3. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja BAPENDA adalah dokumen perencanaan BAPENDA untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

**BAB II**  
**SISTEMATIKA RENJA**  
**Pasal 2**

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan sistematika sebagai berikut :

I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

- 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional

3.3 Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat

3.4 Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026

3.5 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

V. Penutup

### **BAB III**

#### **ISI DAN URAIAN RENJA**

##### **Pasal 3**

Isi beserta uraian Renja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 4**

Renja BAPENDA Tahun 2022 dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) BAPENDA Tahun 2022.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 5**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala BAPENDA ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala BAPENDA.

Ditetapkan di Pangandaran

Pada tanggal 25 Juli 2022

KEPALA BAPENDA  
KABUPATEN PANGANDARAN,



**H. DADANG SOLIHAT, S.Pd., M.Pd.**

NIP. 19730820 199802 1 002

Tembusan:

Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Pangandaran





## DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 LANDASAN HUKUM .....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	10
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....	11
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA	
TAHUN LALU .....	13
2.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN	
LALU .....	13
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT	
DAERAH .....	20
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN	
FUNGSI PERANGKAT DAERAH .....	24
2.4 REVIEW TERHADAP RKPD .....	26
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
MASYARAKAT .....	42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	43
3.1 TELAHAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL .....	43
3.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH	
NASIONAL.....	43
3.3 ARAH KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA	
MENENGAH PROVINSI JAWA BARAT.....	44
3.4 ARAH KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA	
MENGAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN	
2021-2026 .....	46
3.5 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT	
DAERAH .....	49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH .....	50
BAB V PENUTUP .....	56



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) yang telah ditetapkan untuk Tahun anggaran 2023.

Rencana Kerja ini didalamnya merupakan penentuan indikator kinerja yang dapat terukur secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian dan keberhasilan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini kami telah berupaya semaksimal mungkin walaupun dalam proses penyusunannya kami mengalami hambatan, karena keterbatasan yang ada, harapan kami semoga Rencana Kerja (RENJA) ini dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang berkepentingan sehingga dapat dirasakan manfaatnya dalam upaya pencapaian hasil yang terbaik bagi setiap program kegiatan yang dilaksanakan.


Rencana Kerja (RENJA) BAPENDA Kabupaten Pangandaran ini kami sadari masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat kekurangan didalamnya, untuk itu kami mohon masukan dan saran yang dapat dijadikan bahan perbaikan oleh kami untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang akan datang agar lebih baik.

Akhirnya, besar harapan kami semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) BAPENDA Kabupaten Pangandaran ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna, serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pada BAPENDA Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 25 Juli 2022

KEPALA BAPENDA

KABUPATEN PANGANDARAN

  
**H. DADANG SOLIHAT, S.Pd., M.Pd.**

NIP. 19730820 199802 1 002



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengamanatkan pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh daerah masing-masing sesuai otonomi daerah yang mengiringinya. Hal ini membawa konsekuensi terjadinya perubahan atas penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi dan efektif.

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, menyebutkan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi diantaranya tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan secara terus menerus untuk mewujudkan kondisi yang ideal melalui capaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan serta dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai tahapan yang telah direncanakan didasarkan pada kondisi yang ideal. Dalam proses pembangunan, sumber daya yang dimiliki berusaha untuk dimanfaatkan seefektif dan semaksimal mungkin guna mendapatkan hasil yang maksimal.

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data-data serta fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan



baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Kualitas perencanaan memegang peran penting dalam menentukan tingkat keberhasilan proses pembangunan. Sedangkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah disusun dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah dan memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai penjabaran RPJPD dan memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan strategi dan indikasi program 5 tahun secara lintas pembiayaan.
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) setiap tahun anggaran.

Sedangkan Perangkat Daerah (PD) menyusun 2 (dua) dokumen perencanaan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah



tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJPN tahun 2005 - 2025 mengamanatkan pencapaian visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Sementara itu visi pembangunan daerah dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005 – 2025 adalah “Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju Di Indonesia”. Sedangkan visi pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran dalam RPJPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 adalah “Kabupaten Pangandaran sebagai Tujuan Wisata Termaju di Pulau Jawa”.

Penyebaran covid-19 telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak bagi perekonomian Indonesia. Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam menghentikan laju penyebaran covid-19 adalah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Terbatasnya sosial ekonomi mengurangi konsumsi dan kegiatan, investasi melambat sehingga berdampak pada laju perekonomian nasional. Maka kebijakan pembangunan Kabupaten Pangandaran tahun 2022 diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemulihan ekonomi dan sosial yang didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Berdampak juga pada kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam merealisasikan PAD yang telah ditargetkan.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona



- Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang





- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor



- 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);

42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);
43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 48);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 55 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 55).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran disusun dengan maksud :

- a. Memberikan acuan resmi bagi Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023;
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi semua stakeholders pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam pada tahun 2023 dapat tercapai.
- c. Merupakan dokumen perencanaan dan prioritas program satu tahun.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 adalah :

- a. Memperoleh dokumen rencana kerja untuk satu tahun;
- b. Memberikan arah dan acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran; dan
- c. Memberikan pedoman operasional sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### 1.4 **Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a) **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

b) **BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

c) **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

d) **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.



e) BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, dan kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah berkewajiban mengevaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu atau sebelumnya, hal ini bertujuan tidak lain untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Perangkat Daerah terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun tiap urusan dijabarkan kembali dengan program dan kegiatan yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran mengacu pada Rencana Strategis dimana berisi indikator dan target untuk tahun 2023. Untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran memiliki indikator tujuan sebagai berikut :



<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan / Sasaran</b>	<b>Target Tahun 2023</b>	<b>Formulasi</b>
Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase peningkatan Pajak Daerah	1%	Realisasi tahun sebelumnya di bandingkan dengan realisasi tahun berjalan di kali 100%

Realisasi PAD pada tahun 2021 sebesar Rp. Rp. 84.306.982.240,- dengan target sebesar Rp. 131.625.000.000,-. Dikarenakan sudah mulai berkurangnya wabah corona (Covid 19), tempat wisata telah di buka dan lonjakan kenaikan wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran beberapa Pajak Daerah berdampak sehingga ada peningkatan tercapainya target pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah ini terdiri dari:

1. Pajak Hotel dengan target sebesar Rp. 30.584.000.000,- realisasi pada triwulan II tahun 2022 sebesar Rp. 9.553.890.158,- (31,24%)
2. Pajak Restoran dengan target sebesar Rp. 11.180.000.000,- realisasi pada triwulan II tahun 2022 sebesar Rp. 3.567.625.589,- (31,91%)
3. Pajak Hiburan dengan target sebesar Rp. 376.000.000,- realisasi pada triwulan II tahun 2022 sebesar Rp. 112.001.880,- (29,79%)
4. Pajak Reklame dengan target sebesar Rp. 5.000.000.000,- realisasi pada triwulan II tahun 2022 sebesar Rp. 1.646.362.932,- (32,93%)





5. Pajak Penerangan Jalan dengan target sebesar Rp. 30.000.000.000,- realisasi pada triwulan II tahun 2022 sebesar Rp. 14.254.759.681,- (47,52%)
6. Pajak Parkir dengan target sebesar Rp. 120.000.000,- realisasi pada triwulan II tahun 2022 sebesar Rp. 70.263.106,- (58,55%)
7. Pajak Air Tanah dengan target sebesar Rp. 540.000.000,- realisasi pada triwulan II tahun 2022 sebesar Rp. 160.376.892,- (29,70%)
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan target sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi pada triwulan II tahun 2022 sebesar Rp. 100.362.315,- (100,36%)
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dengan target sebesar Rp. 18.650.000.000,- realisasi pada triwulan II tahun 2022 sebesar Rp. 12.931.518.475,- (69,34%)
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan target sebesar Rp. 15.000.000.000,- realisasi pada triwulan II tahun 2022 sebesar Rp. 7.632.111.402,- (50,88%)

Untuk Anggaran Belanja Langsung yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 3.676.142.679,00 ( tiga milyar enam ratus tujuh puluh enam juta serratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan rupiah ). Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2021, terealisasi sebesar Rp. 2.978.362.180,00 ( dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu serratus delapan puluh rupiah ) atau sebesar 81,02%

Secara lengkap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja ( capaian kinerja dan realisasi anggaran ) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran secara detail dapat dilihat dalam form berikut ( TC-29 ) :



**Tabel T-C 29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja**  
**Badan Pendapatan Daerah s/d Tahun 2021**

**BAPENDA KABUPATEN PANGANDARAN**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai pemetaan permendagri 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran DPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kab/kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	IK	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB	%	100	3.676.142.679,00	80,10	2.978.362.180	80,10	81,02	BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN DAN BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN
	Persentase Realisasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainnya	%	100		90,90		90,90		
	Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	%	100		86,13		86,13		
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase objek pajak PBB - BPHTB yang termutakhirkan	%	20	3.676.142.679,00	0	2.978.362.180	0,00	81,02	BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN DAN BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN
	persentase pengaduan wajib pajak PBB BPHTB yang terlayani	%	100		100		100,00		
	Jumlah wajib pajak baru sektor pajak daerah lainnya yang terdaftar	Wajib Pajak	150		322		214,67		
	persentase pengaduan wajib pajak Daerah lainnya yang terlayani	%	100		100		100,00		



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai pemetaan permendagri 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran DPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kab/kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	IK	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jumlah dokumen evaluasi pengelolaan pendapatan	Dokumen	12		12		100,00		
	Persentase Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak sesuai aturan yang berlaku	%	70		90		128,57		
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Aplikasi Yang Dikelola	Aplikasi	1		3		300,00	88,57	BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
	Jumlah SPPT yang didistribusikan	SPPT	465000	335.010.000,00	0	296.727.750	0,00		
	Jumlah DHKP yang didistribusikan	Box	0		0		0,00		
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen hasil analisa	Dokumen	3	1.939.470.743,00	3	1.438.435.743	100,00	74,17	BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang Mengikuti Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Wajib Pajak	150	25.715.000,00	150	21.915.000	100,00	85,22	BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah alat sistem online pajak hotel dan restoran.	Unit	50	36.015.400,00	0	36.015.400	0,00	100,00	BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN
	Jumlah waktu pengelolaan pajak hotel dan restoran.	Kali	12	-	0		0,00		
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	aplikasi yang di update	Aplikasi	1	17.820.000,00	1	17.820.000	100,00	100,00	BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
	Jumlah Dokumen Tentang Data Objek pajak yang dihasilkan	Dokumen	1	-	0		0,00		



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai pemetaan permendagri 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran DPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kab/kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	IK	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Obyek Pajak dan Subjek Pajak PBB P2	Objek Pajak	85000	27.495.000,00	0	27.495.000	0,00	100,00	BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah transaksi pemindahan hak atas tanah dan bangunan	Dokumen	486	102.474.636,00	736	94.370.137	151,44	92,09	BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Yang Ternilai	Objek Pajak	7000	252.937.000,00	20535	241.050.000	293,36	95,30	BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak	Objek Pajak	5000	223.485.000,00	6865	193.892.500	137,30	86,76	BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring	Objek Pajak	983	129.911.900,00	1950	129.911.900	198,37	100,00	BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	4200	500.095.000,00	6316	436.865.750	150,38	87,36	BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN
	Jumlah laporan realisasi PBB-P2	Laporan	12	-	18		150,00		BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai pemetaan permendagri 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran DPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kab/kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	IK	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jumlah laporan Monitoring Evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah	Laporan	93	-	0		0,00		BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah permohonan Pembatalan, Keberatan, Pengurangan dan Mutasi Obyek Pajak	Dokumen	345	50.240.000,00	0	40.240.000	0,00	80,10	BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN
	Jumlah reklame yang ditertibkan	Reklame	10	-	0		0,00		
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah yang Diperiksa	Wajib Pajak	60	35.473.000,00	7	3.623.000	11,67	10,21	BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN



## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Pangandaran, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran menjabarkannya dalam bentuk program dan kegiatan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan program / kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun seluruh capaian kinerja yang diuraikan dalam capaian sasaran strategis dan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) dapat dilihat diform sebagai berikut ( T-C 30 ):



**Tabel T-C 30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Pangandaran**

NO	Indikator	Satuan	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPKD							Realisasi Capaian						Catatan Analisis	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Persentase Realisasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB	%			100	100	100	100	100	100	100	80,1	80,1	0	0	0	0	0	
	Persentase Realisasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainnya	%			100	100	100	100	100	100	100	90,9	90,9	0	0	0	0	0	
	Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	%			100	100	100	100	100	100	100	86,13	86,13	0	0	0	0	0	
4.1	Persentase objek pajak PBB - BPHTB yang termutakhirkan	%			20	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	
	persentase pengaduan wajib pajak PBB BPHTB yang terlayani	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	
	Jumlah wajib pajak baru sektor pajak daerah lainnya yang terdaftar	Wajib Pajak			150	150	150	150	150	150	150	574	322	0	0	0	0	0	
	persentase pengaduan wajib pajak Daerah lainnya yang terlayani	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	
	Jumlah dokumen evaluasi pengelolaan pendapatan	Dokumen			12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	
	Persentase Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak sesuai aturan yang berlaku	%			68	70	72	74	76	78	80	11,67	90	0	0	0	0	0	



NO	Indikator	Satuan	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPKD						Realisasi Capaian						Catatan Analisis		
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.1.1	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen			12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	
4.1.2	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen			12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	
4.1.3	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	
4.1.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit			12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.5	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	
4.1.6	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	
4.1.7	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak			486	486	490	495	500	505	510	486	736	0	0	0	0	0	





NO	Indikator	Satuan	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPKD						Realisasi Capaian						Catatan Analisis		
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.1.8	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen			12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	
4.1.9	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan			5000	5000	5005	5010	5015	5020	5025	1950	1950	0	0	0	0	0	
4.1.10	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen			12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	
4.1.11	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen			12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	
4.1.12	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen			12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	
4.1.13	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen			12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	
4.1.14	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan			12	12	12	12	12	12	12	0	12	0	0	0	0	0	

## 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sejalan dengan perkembangan keadaan isu dan masalah yang ada di Kabupaten Pangandaran, tahun 2023 terdapat beberapa hal yang perlu segera ditangani oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran yaitu :

1. Pemulihan dampak pandemi Covid-19, yaitu :
  - a. Pemulihan ekonomi melalui peningkatan dukungan pada sektor perdagangan, UMKM, kemudahan investasi, peningkatan produksi pada sektor-sektor unggulan di Kabupaten Pangandaran seperti perikanan, pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan pariwisata; serta peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.
  - b. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran melalui pengurangan beban kemiskinan dengan distribusi bantuan sosial secara adil dan merata, meningkatkan pendapatan masyarakat; perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.
2. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan penanganan kesehatan dengan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan kualitas SDM kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; pengendalian jumlah penduduk, peningkatan pelayanan keluarga berencana dan sejahtera; peningkatan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan dengan pemberian beasiswa, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah.

4. Penguatan ketahanan bencana melalui penguatan mitigasi, adaptasi, kedaruratan dan pemulihan dampak bencana. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan daerah dalam menghadapi bencana alam dan non alam.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Bapenda dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional maupun nasional. Terkait dengan hal tersebut, perencanaan seharusnya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi pada waktu mendatang sehingga arah pelaksanaan pembangunan dapat menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan meningkat sesuai dengan tujuan bersama yaitu menuju good governance dan clean government. Terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Badan Pendapatan Daerah perlu meningkatkan dan memantapkan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah agar dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Tuntutan pelayanan prima oleh masyarakat serta adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, juga membutuhkan inovasi dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah. Aparatur daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah penghargaan kepada wajib pajak yang patuh pajak. Diharapkan dengan diberlakukannya reward and punishment, yaitu pemberian penghargaan atau hadiah bagi yang patuh pajak dan sanksi atau hukuman bagi yang melakukan pelanggaran pembayaran pajak, akan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Terkait dengan hal-hal tersebut diatas, isu-isu strategis yang muncul dan perlu mendapatkan perhatian Bapenda Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

1. Beberapa regulasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan perlu dilakukan review seiring dengan perkembangan kelembagaan serta terbitnya produk hukum tingkat atasnya.

- Selain itu belum cukup tersedianya produk hukum yang berkaitan dengan strategi optimalisasi pendapatan daerah, dan Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan pajak daerah yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga memudahkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;
2. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia khususnya dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
  3. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, terutama dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar, termasuk dalam melakukan porporasi karcis/bill/nota penjualan serta melaporkan secara teratur bonggol karcis/bill/nota penjualan dan sisa karcis/bill/nota pejualan yang tidak laku setiap bulannya, termasuk dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
  4. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak daerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan kemudahan dalam membayar pajak daerah;
  5. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat;
  6. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pendapatan daerah;
  7. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada;
  8. Terbatasnya anggaran yang tersedia;
  9. Belum optimalnya pengelolaan system informasi daerah.

#### **2.4 REVIEW TERHADAP RKPD**

Dari isu-isu strategis dan permasalahan yang muncul sebagaimana tersebut di atas, maka Bapenda Kabupaten Pangandaran perlu memberikan perhatian dan prioritas dalam penyelesaiannya. Guna mendukung tercapainya prioritas penyelesaian isu – isu strategis dan permasalahan tersebut maka perlu disusun program dan kegiatan untuk merealisasikannya. Penyusunan program dan kegiatan Bapenda Kabupaten Pangandaran tahun 2023 mengacu pada program dan kegiatan tahun 2023 dan RKPD tahun 2023

Review Rancangan awal RKPD tahun 2023 terhadap Hasil Analisa Kebutuhan tahun 2023, dapat dilihat pada Tabel T-C 31 di bawah ini:



**Tabel T-C 31**  
**Review Terhadap RKPD Tahun 2023**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran**

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5	Urusan Keuangan				26.416.045.7 61					21.987.569.3 56
5.02	Badan Pendapatan Daerah				26.416.045.7 61					21.987.569.3 56
5.02.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Bapenda Kab. Pangandaran	91%	13.575.791.3 08	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Bapenda Kab. Pangandaran	91%	14.108.940.3 56
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Bapenda Kab. Pangandaran	97%			Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Bapenda Kab. Pangandaran	97%	
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Bapenda Kab. Pangandaran	85%			Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Bapenda Kab. Pangandaran	85%	
		Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Bapenda Kab. Pangandaran	92%			Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Bapenda Kab. Pangandaran	92%	



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5.02.01.201.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Bapenda Kab. Pangandar an	92%	275.943.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Bapenda Kab. Pangandar an	92%	45.000.000
		Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	Bapenda Kab. Pangandar an	92%			Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	Bapenda Kab. Pangandar an	92%	
		Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	Bapenda Kab. Pangandar an	92%			Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	Bapenda Kab. Pangandar an	92%	
5.02.01.201.0 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda Kab. Pangandara n	4 Dokume n	106.470.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda Kab. Pangandara n	4 Dokume n	30.000.000



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5.02.01.201.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda Kab. Pangandaran	4 Dokumen	169.473.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda Kab. Pangandaran	4 Dokumen	15.000.000
5.02.01.202.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>82 Persen</b>	<b>5.839.878.702</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>82 Persen</b>	<b>9.230.575.099</b>
5.02.01.202.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda Kab. Pangandaran	20 Orang	5.691.158.702	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda Kab. Pangandaran	20 Orang	9.147.575.099



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5.02.01.202.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bapenda Kab. Pangandaran	5 Dokumen	106.470.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bapenda Kab. Pangandaran	5 Dokumen	63.000.000
5.02.01.202.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan aporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bapenda Kab. Pangandaran	1 Dokumen	25.350.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan aporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bapenda Kab. Pangandaran	1 Dokumen	10.000.000
5.02.01.202.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bapenda Kab. Pangandaran	1 Dokumen	16.900.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bapenda Kab. Pangandaran	1 Dokumen	10.000.000





Kode	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5.02.01.203.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Bapenda Kab. Pangandaran	74 Unit	107.991.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Bapenda Kab. Pangandaran	74 Unit	63.900.000
5.02.01.203.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bapenda Kab. Pangandaran	3 Laporan	107.991.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bapenda Kab. Pangandaran	3 Laporan	63.900.000
5.02.01.205.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	Bapenda Kab. Pangandaran	93 Persen	386.995.297	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	Bapenda Kab. Pangandaran	93 Persen	35.255.000
5.02.01.205.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Bapenda Kab. Pangandaran	Paket	327.414.347	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Bapenda Kab. Pangandaran	Paket	-



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5.02.01.205.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bapenda Kab. Pangandaran	5 Dokumen	59.580.950	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bapenda Kab. Pangandaran	5 Dokumen	35.255.000
5.02.01.206.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>90 Persen</b>	<b>2.493.417.670</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>90 Persen</b>	<b>1.349.426.200</b>
5.02.01.206.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bapenda Kab. Pangandaran	1 Paket	92.950.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bapenda Kab. Pangandaran	1 Paket	10.000.000
5.02.01.206.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bapenda Kab. Pangandaran	1 Paket	1.117.681.282	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bapenda Kab. Pangandaran	1 Paket	650.000.000



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5.02.01.206.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bapenda Kab. Pangandaran	1 Paket	233.298.078	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bapenda Kab. Pangandaran	1 Paket	228.146.200
5.02.01.206.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bapenda Kab. Pangandaran	4 Dokumen	19.063.200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Bapenda Kab. Pangandaran	4 Dokumen	11.280.000
5.02.01.206.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Bapenda Kab. Pangandaran	100 Laporan	1.030.425.110	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Bapenda Kab. Pangandaran	100 Laporan	450.000.000
5.02.01.207.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>25 Persen</b>	<b>297.886.160</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>25 Persen</b>	<b>417.993.000</b>



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5.02.01.207.0 1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Bapenda Kab. Pangandaran	2 Unit	113.027.200	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Bapenda Kab. Pangandaran	2 Unit	257.009.400
5.02.01.207.0 5.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Bapenda Kab. Pangandaran	1 Paket	184.858.960	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Bapenda Kab. Pangandaran	1 Paket	160.983.600
<b>5.02.01.208.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>87 Persen</b>	<b>3.001.260.990</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>87 Persen</b>	<b>2.431.791.057</b>
5.02.01.208.0 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Bapenda Kab. Pangandaran	1 Laporan	10.140.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Bapenda Kab. Pangandaran	1 Laporan	6.000.000
5.02.01.208.0 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bapenda Kab. Pangandaran	4 Laporan	681.695.481	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bapenda Kab. Pangandaran	4 Laporan	350.000.000



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5.02.01.208.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bapenda Kab. Pangandaran	4 Laporan	2.309.425.509	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bapenda Kab. Pangandaran	4 Laporan	2.075.791.057
<b>5.02.01.209.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>92 Persen</b>	<b>1.172.418.289</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>92 Persen</b>	<b>535.000.000</b>
5.02.01.209.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bapenda Kab. Pangandaran	25 Unit	387.632.989	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bapenda Kab. Pangandaran	25 Unit	165.000.000
5.02.01.209.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bapenda Kab. Pangandaran	40 Unit	224.347.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bapenda Kab. Pangandaran	40 Unit	235.000.000



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5.02.01.209.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bapenda Kab. Pangandaran	1 Unit	560.437.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bapenda Kab. Pangandaran	1 Unit	135.000.000
5.02.04.	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>100%</b>	<b>12.840.254.453</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>100%</b>	<b>7.878.629.000</b>
		<b>Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainnya</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>100%</b>			<b>Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainnya</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>100%</b>	
		<b>Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>100%</b>			<b>Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>100%</b>	
5.02.04.201	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase objek pajak PBB - BPHTB yang termutakhirkan</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>20%</b>	<b>12.840.254.453</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase objek pajak PBB - BPHTB yang termutakhirkan</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>20%</b>	<b>7.878.629.000</b>



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		persentase pengaduan wajib pajak PBB BPHTB yang terlayani	Bapenda Kab. Pangandaran	100%			persentase pengaduan wajib pajak PBB BPHTB yang terlayani	Bapenda Kab. Pangandaran	100%	
		Jumlah wajib pajak baru sektor pajak daerah lainnya yang terdaftar	Bapenda Kab. Pangandaran	150 Wajib Pajak			Jumlah wajib pajak baru sektor pajak daerah lainnya yang terdaftar	Bapenda Kab. Pangandaran	150 Wajib Pajak	
		persentase pengaduan wajib pajak Daerah lainnya yang terlayani	Bapenda Kab. Pangandaran	100%			persentase pengaduan wajib pajak Daerah lainnya yang terlayani	Bapenda Kab. Pangandaran	100%	
		Jumlah dokumen evaluasi pengelolaan pendapatan	Bapenda Kab. Pangandaran	12 Dokumen			Jumlah dokumen evaluasi pengelolaan pendapatan	Bapenda Kab. Pangandaran	12 Dokumen	
		Persentase Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak sesuai aturan yang berlaku	Bapenda Kab. Pangandaran	72%			Persentase Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak sesuai aturan yang berlaku	Bapenda Kab. Pangandaran	72%	
5.02.04.201.0 1.	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	3 Dokumen	1.032.605.210	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	3 Dokumen	488.755.000



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5.02.04.201.0 2.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen hasil analisa	Bapenda Kab. Pangandaran	3 Dokumen	280.046.520	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen hasil analisa	Bapenda Kab. Pangandaran	3 Dokumen	171.205.000
5.02.04.201.0 3.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	12 Laporan	936.868.400	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	12 Laporan	673.819.000
5.02.04.201.0 4.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	5 Unit	949.398.060	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	5 Unit	788.927.000





Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5.02.04.201.05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	2 Laporan	780.957.450	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	2 Laporan	1.253.703.000
5.02.04.201.06.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	3 Laporan	392.756.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	3 Laporan	240.842.000



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5.02.04.201.07.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Bapenda Kab. Pangandaran	20000 Obyek Pajak	493.804.480	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Bapenda Kab. Pangandaran	20000 Obyek Pajak	310.897.000
5.02.04.201.08.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	7000 Dokumen	411.037.575	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	7000 Dokumen	252.524.000
5.02.04.201.09.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	6000 Layanan	5.547.528.428	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	6000 Layanan	1.563.109.000
5.02.04.201.10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Bapenda Kab. Pangandaran	1500 Dokumen	675.337.520	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Bapenda Kab. Pangandaran	1500 Dokumen	414.124.000



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5.02.04.201.1 1.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	4200 Dokumen	321.948.380	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	4200 Dokumen	772.422.000
5.02.04.201.1 2.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	345 Dokumen	240.135.480	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	345 Dokumen	134.202.000
5.02.04.201.1 3.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	60 Dokumen	516.849.320	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	60 Dokumen	656.643.000
5.02.04.201.1 4.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	150 Laporan	260.981.630	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	150 Laporan	157.457.000



## **2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Sesuai dengan tugas pokok Bapenda adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan, maka OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran tidak mempunyai program dan kegiatan yang berkaitan atau menampung usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

##### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dimana didalamnya termuat Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2019 - 2024 dan memuat juga Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016–2025, dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Visi Pembangunan Nasional yang dimuat dalam RPJMN tahun 2019 - 2024 adalah **“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**. Visi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan 7 Misi Pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negarakepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju,berkeseimbangan dan demokratis berdasarkan negarahukum.
3. Mewujudkan politikluar negeri bebas – aktif dan memperkuat jati diri sebagai negaramaritime.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,majudansejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdayasaing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingannasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadiandalam kebudayaan.



Untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan dalam sembilan agenda prioritas yang disebut dengan NAWA CITA, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestic;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

### **3.3 Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat**

Visi pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 "**Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi**" (nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif dan nilai inovatif) Visi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan 5 Misi Pembangunan, yaitu :

1. Misi pertama, membentuk manusia pancasila yang bertaqwa; melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat

peradaban, dengan sasaran misi yaitu pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara;

2. Misi kedua, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif; dengan sasaran misi yaitu kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, millennial juara, perguruan tinggi juara, dan smk juara;
3. Misi ketiga, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah; dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara;
4. Misi keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan; dengan sasaran misi yaitu nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, umkm juara, dan wirausaha juara; serta
5. Misi kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dengan sasaran misi yaitu birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara.

Program Unggulan Provinsi Jawa Barat 2018-2023 sebagai berikut:

1. Pertama, meningkatkan akses pendidikan untuk semua;
2. Kedua, desentralisasi pelayanan kesehatan;
3. Ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi;
4. Keempat, mengembangkan destinasi dan infrastruktur pariwisata;
5. Kelima, mewujudkan pesantren juara;
6. Keenam, meningkatkan infrastruktur konektivitas wilayah;
7. Ketujuh, gerakan membangun desa;

8. Kedelapan, memberikan subsidi gratis untuk golongan ekonomi lemah; serta
9. Kesembilan, meningkatkan inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

### 3.4 Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026

Dalam pasal 262 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Berdasarkan pertimbangan kondisi daerah Kabupaten Pangandaran, permasalahan-permasalahan pembangunan, tantangan-tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan terkait visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Visi Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 adalah **“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”**

Agar rumusan visi di atas dapat diimplementasikan lebih operasional, maka perlu dijabarkan pada pokok-pokok visi berikut penjelasannya sebagaimana yang telah disajikan dalam tabel, sebagai berikut :

<b>Visi</b>	<b>Pokok – Pokok Visi</b>	<b>Penjelasan</b>
<i>“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”</i>	Pangandaran Juara	Pangandaran juara mencerminkan kondisi masyarakat yang terpenuhi secara layak akan kebutuhan baik itu ekonomi, sosial, politik, hingga keamanan yang mencakup aspek-aspek dalam kehidupan berbasis potensi lokal. Dalam hal ini digambarkan melalui tingkat kualitas pendidikan, indeks





Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan
		pembangunan manusia, tingkat pendapatan per kapita, dan indikator-indikator yang lain.
	Pariwisata Pangandaran yang berkelas dunia	Pembangunan berbasis pariwisata yang ingin diwujudkan dalam visi ini tidak hanya berskala nasional namun ditekankan pada skala internasional. Pariwisata Berkelas Dunia menggambarkan potensi pariwisata Kabupaten Pangandaran yang mampu ditingkatkan secara sinergis dan berkualitas dengan melakukan inovasi-inovasi berkelanjutan pada pengembangan pariwisata, sehingga tidak hanya berkembang secara nasional namun juga mencapai tingkat internasional.
	Berdasarkan nilai-nilai karakter bangsa	Nilai ( <i>value</i> ) merupakan dasar dari semangat juang serta pola hidup masyarakat yang memiliki peran penting dalam sebuah proses pembangunan. Pada nilai-nilai karakter bangsa terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup dalam rangka mencapai derajat kemanusiaan yang lebih tinggi, hidup yang lebih bermanfaat, penuh kedamaian, serta kebahagiaan. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pangandaran yang mawas diri dan memiliki sikap silih asah mencerminkan masyarakat yang

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan
		Kabupaten Pangandaran yang hidup bersama dan saling mengembangkan nilai-nilai kepribadian serta berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi modal besar bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran kedepannya.

Visi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Misi Pembangunan, Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan yang dilaksanakan sebagai berikut :

Visi	Pokok - Pokok Visi	Misi
<i>“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”</i>	Pangandaran Juara	Misi 3: Mengembangkan aksesibilitas pendidikan sampai perguruan tinggi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan
		Misi 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal
	Pariwisata Pangandaran yang berkelas dunia	Misi 2: Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan
		Misi 6: Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan
	Berdasarkan nilai-nilai karakter bangsa	Misi 1: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama
		Misi 5: mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel

### 3.5 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran merupakan penjabaran dari Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran. Dalam menentukan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran tidak terlepas dari Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran. Secara rinci Tujuan dan Sasaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran adalah sbb:

#### 3.5.1 Tujuan

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran yaitu :  
**“Meningkatkan Kualitas Dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”**

#### 3.5.2 Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran antara lain :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase peningkatan Pajak Daerah	1%	1%	1%	1%	1%



#### **BAB IV**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran terdiri dari 2 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut :



Tabel T-C 33

RKPD Tahun 2023

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Prakiraan Maju Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5	Urusan Keuangan				21.987.569.356			20.501.563.817
5.02	Badan Pendapatan Daerah				21.987.569.356			20.501.563.817
5.02.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Bapenda Kab. Pangandaran	91%	14.108.940.356	APBD	91%	12.258.040.333
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Bapenda Kab. Pangandaran	97%		APBD	97%	
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Bapenda Kab. Pangandaran	85%		APBD	85%	
		Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Bapenda Kab. Pangandaran	92%		APBD	92%	
5.02.01.201.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Bapenda Kab. Pangandaran	92%	45.000.000	APBD	92%	55.125.000
		Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	Bapenda Kab. Pangandaran	92%		APBD	92%	
		Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	Bapenda Kab. Pangandaran	92%		APBD	92%	
5.02.01.201.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	4 Dokumen	30.000.000	APBD	4 Dokumen	38.587.500
5.02.01.201.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda Kab. Pangandaran	4 Dokumen	15.000.000	APBD	4 Dokumen	16.537.500
5.02.01.202.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	Bapenda Kab. Pangandaran	82 Persen	9.230.575.099	APBD	82 Persen	4.898.202.861



# Rencana Kerja (RENJA) 2023

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Prakiraan Maju Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5.02.01.202.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda Kab. Pangandaran	20 Orang	9.147.575.099	APBD	20 Orang	4.826.540.361
5.02.01.202.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bapenda Kab. Pangandaran	5 Dokumen	63.000.000	APBD	5 Dokumen	38.587.500
5.02.01.202.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan aporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bapenda Kab. Pangandaran	1 Dokumen	10.000.000	APBD	1 Dokumen	16.537.500
5.02.01.202.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bapenda Kab. Pangandaran	1 Dokumen	10.000.000	APBD	1 Dokumen	16.537.500
<b>5.02.01.203.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>74 Unit</b>	<b>63.900.000</b>	<b>APBD</b>	<b>74 Unit</b>	<b>38.587.500</b>
5.02.01.203.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bapenda Kab. Pangandaran	3 Laporan	63.900.000	APBD	3 Laporan	38.587.500
<b>5.02.01.205.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>93 Persen</b>	<b>35.255.000</b>	<b>APBD</b>	<b>93 Persen</b>	<b>306.888.802</b>
5.02.01.205.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Bapenda Kab. Pangandaran	Paket	-	APBD	Paket	277.672.552
5.02.01.205.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bapenda Kab. Pangandaran	5 Dokumen	35.255.000	APBD	5 Dokumen	29.216.250
<b>5.02.01.206.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>90 Persen</b>	<b>1.349.426.200</b>	<b>APBD</b>	<b>90 Persen</b>	<b>1.847.105.228</b>
5.02.01.206.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bapenda Kab. Pangandaran	1 Paket	10.000.000	APBD	1 Paket	78.828.750
5.02.01.206.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bapenda Kab. Pangandaran	1 Paket	650.000.000	APBD	1 Paket	947.879.702
5.02.01.206.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bapenda Kab. Pangandaran	1 Paket	228.146.200	APBD	1 Paket	308.104.716
5.02.01.206.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bapenda Kab. Pangandaran	4 Dokumen	11.280.000	APBD	4 Dokumen	16.167.060



# Rencana Kerja (RENJA) 2023

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Prakiraan Maju Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5.02.01.206.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Bapenda Kab. Pangandaran	100 Laporan	450.000.000	APBD	100 Laporan	496.125.000
<b>5.02.01.207.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>25 Persen</b>	<b>417.993.000</b>	<b>APBD</b>	<b>25 Persen</b>	<b>643.860.000</b>
5.02.01.207.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Bapenda Kab. Pangandaran	2 Unit	257.009.400	APBD	2 Unit	441.000.000
5.02.01.207.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Bapenda Kab. Pangandaran	1 Paket	160.983.600	APBD	1 Paket	202.860.000
<b>5.02.01.208.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>87 Persen</b>	<b>2.431.791.057</b>	<b>APBD</b>	<b>87 Persen</b>	<b>3.517.218.072</b>
5.02.01.208.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Bapenda Kab. Pangandaran	1 Laporan	6.000.000	APBD	1 Laporan	11.025.000
5.02.01.208.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bapenda Kab. Pangandaran	4 Laporan	350.000.000	APBD	4 Laporan	578.130.205
5.02.01.208.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bapenda Kab. Pangandaran	4 Laporan	2.075.791.057	APBD	4 Laporan	2.928.062.867
<b>5.02.01.209.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>92 Persen</b>	<b>535.000.000</b>	<b>APBD</b>	<b>92 Persen</b>	<b>951.052.870</b>
5.02.01.209.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bapenda Kab. Pangandaran	25 Unit	165.000.000	APBD	25 Unit	427.365.370
5.02.01.209.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bapenda Kab. Pangandaran	40 Unit	235.000.000	APBD	40 Unit	220.500.000
5.02.01.209.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bapenda Kab. Pangandaran	1 Unit	135.000.000	APBD	1 Unit	303.187.500
<b>5.02.04.</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>100%</b>	<b>7.878.629.000</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>8.243.523.484</b>
		<b>Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainnya</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>100%</b>		<b>APBD</b>	<b>100%</b>	



# Rencana Kerja (RENJA) 2023

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Prakiraan Maju Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		<b>Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>100%</b>		<b>APBD</b>	<b>100%</b>	
<b>5..02.04.201.</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase objek pajak PBB - BPHTB yang termutakhirkan</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>20%</b>	<b>7.878.629.000</b>	<b>APBD</b>	<b>20%</b>	<b>8.243.523.484</b>
		<b>persentase pengaduan wajib pajak PBB BPHTB yang terlayani</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>100%</b>		<b>APBD</b>	<b>100%</b>	
		<b>Jumlah wajib pajak baru sektor pajak daerah lainnya yang terdaftar</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>150 Wajib Pajak</b>		<b>APBD</b>	<b>150 Wajib Pajak</b>	
		<b>persentase pengaduan wajib pajak Daerah lainnya yang terlayani</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>100%</b>		<b>APBD</b>	<b>100%</b>	
		<b>Jumlah dokumen evaluasi pengelolaan pendapatan</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>12 Dokumen</b>		<b>APBD</b>	<b>12 Dokumen</b>	
		<b>Persentase Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak sesuai aturan yang berlaku</b>	<b>Bapenda Kab. Pangandaran</b>	<b>72%</b>		<b>APBD</b>	<b>72%</b>	
5.02.04.201.01.	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	3 Dokumen	488.755.000	APBD	3 Dokumen	875.728.649
5.02.04.201.02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen hasil analisa	Bapenda Kab. Pangandaran	3 Dokumen	171.205.000	APBD	3 Dokumen	237.500.991
5.02.04.201.03.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	12 Laporan	673.819.000	APBD	12 Laporan	794.536.470
5.02.04.201.04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	5 Unit	788.927.000	APBD	5 Unit	805.162.585
5.02.04.201.05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	2 Laporan	1.253.703.000	APBD	2 Laporan	1.764.811.991
5.02.04.201.06.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	3 Laporan	240.842.000	APBD	3 Laporan	333.087.300
5.02.04.201.07.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Bapenda Kab. Pangandaran	20000 Obyek Pajak	310.897.000	APBD	20000 Obyek Pajak	418.784.184





## Rencana Kerja (RENJA) 2023

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Prakiraan Maju Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)							
5.02.04.201.08.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	7000 Dokumen	252.524.000	APBD	7000 Dokumen	348.591.481
5.02.04.201.09.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	6000 Layanan	1.563.109.000	APBD	6000 Layanan	956.230.839
5.02.04.201.10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Bapenda Kab. Pangandaran	1500 Dokumen	414.124.000	APBD	1500 Dokumen	572.738.166
5.02.04.201.11.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	4200 Dokumen	772.422.000	APBD	4200 Dokumen	273.036.991
5.02.04.201.12.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	345 Dokumen	134.202.000	APBD	345 Dokumen	203.653.359
5.02.04.201.13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	60 Dokumen	656.643.000	APBD	60 Dokumen	438.327.981
5.02.04.201.14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda Kab. Pangandaran	150 Laporan	157.457.000	APBD	150 Laporan	221.332.497



## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan bagi Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap tahun anggaran. Oleh karena itu setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja). Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

Pada Renja memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut masih bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran serta kemampuan keuangan daerah yang tersedia.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 yang akan terwujud dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 ini masih belum sempurna. Sehingga kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami perlukan guna perbaikan dokumen tersebut. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam waktu satu tahun kedepan.

Paangandaran, 25 Juli 2022  
KEPALA BAPENDA  
KABUPATEN PANGANDARAN



**H. DADANG SOLIHAT, SPd, Mpd**  
NIP. 19730820 199802 1 002